

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKjIP)  
DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS  
TAHUN 2019**



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS**

## Pengantar

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-nya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada dasarnya merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good government and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan satu tahun ke depan.

Penyusunan LKjIP Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP. Hasil tersebut menjadi pemicu bagi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas untuk terus meningkatkan capaian kinerja satu tahun ke depan.

Akhirnya kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2019, semoga LKjIP ini akan bermfaat bagi peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas dan menjadi inspirasi koreksi yang konstruktif.

Purwokerto, Pebruari 2020

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS

**Dr. Ir. IRAWADI, CES.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19640418 199103 1 007

# Bab I PENDAHULUAN

## 1. Kondisi Geografis

Kabupaten Banyumas yang secara geografis terletak diantara 108°39'17" BT - 109°27'15" BT dan diantara 7°15'05" LS - 7°37'10" LS. terdiri dari 27 Kecamatan dan 301 Desa serta 30 Kelurahan.

Wilayah Kabupaten Banyumas dibatasi oleh :

- o Sebelah Utara : Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang
- o Sebelah Selatan : Kabupaten Cilacap
- o Sebelah Barat : Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes
- o Sebelah Timur : Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen

Wilayah Kabupaten Banyumas berdasarkan ketinggian tanahnya dapat diuraikan sebagai berikut :

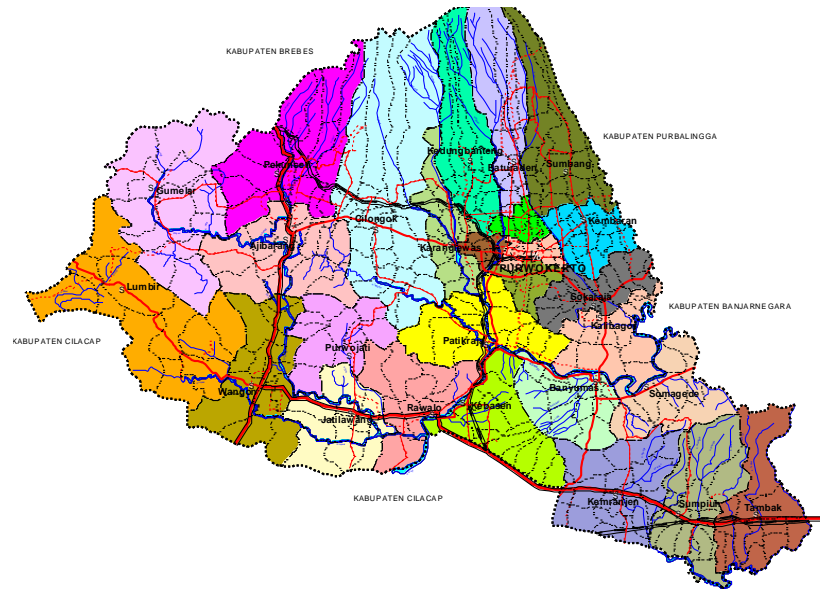
- a. Dataran rendah dengan ketinggian 0 – 25 meter di atas permukaan laut (dpl) mempunyai luas 26.724,4 ha atau 20,13% dari luas wilayah Kabupaten Banyumas. Wilayah yang berada pada ketinggian ini meliputi kecamatan Jatilawang, Kecamatan Kebasen, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Tambak, sebagian Kecamatan Kalibagor, sebagian Kecamatan Karanglewas, sebagian Kecamatan Kemranjen, sebagian Kecamatan Sokaraja, dan sebagian Kecamatan Sumpiuh.
- b. Dataran perbukitan dengan ketinggian >25 - 100 meter dpl mempunyai luas 42.310,30 ha atau 31,87% dari luas wilayah Kabupaten Banyumas. Wilayah yang berada pada ketinggian ini meliputi kecamatan Kembaran, Kecamatan Lumbir, Kecamatan Patikraja, Kecamatan Purwojati, Kota Purwokerto, Kecamatan Wangon, sebagian Kecamatan Kalibagor, sebagian Kecamatan Kedungbanteng, sebagian Kecamatan Karanglewas, sebagian Kecamatan Somagede, sebagian Kecamatan Sumbang, dan sebagian Kecamatan Sokaraja.
- c. Dataran tinggi dengan ketinggian >100 – 500 meter dpl mempunyai luas 40.385,3 ha atau 30,42% dari luas wilayah Kabupaten Banyumas. Wilayah yang berada pada ketinggian ini meliputi Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Banyumas, sebagian Kecamatan Baturaden, sebagian Kecamatan Cilongok, sebagian Kecamatan Pekuncen, dan sebagian Kecamatan Somagede.
- d. Dataran dengan ketinggian >500 – 1000 meter dpl mempunyai luas 17.364,9 ha atau 13,08% dari luas wilayah Kabupaten Banyumas. Wilayah yang berada pada ketinggian ini meliputi sebagian Kecamatan Gumelar, sebagian Kecamatan Kedungbanteng, sebagian Kecamatan Pekuncen, sebagian

Kecamatan Cilongok, sebagian Kecamatan Baturaden dan sebagian Kecamatan Sumbang.

- e. Dataran dengan ketinggian >1000 meter dpl mempunyai luas 5.974,1 ha atau 4,50% dari luas wilayah Kabupaten Banyumas. Wilayah yang berada pada ketinggian ini meliputi sebagian Kecamatan Baturaden, sebagian Kecamatan Cilongok, sebagian Kecamatan Pekuncen dan sebagian Kecamatan Sumbang.

Sedangkan berdasarkan kemiringannya dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Kemiringan 0 – 2% meliputi areal seluas 42.629,09 ha atau 32,11 % dari luas wilayah Kabupaten Banyumas. Wilayah dengan kemiringan ini meliputi Kota Purwokerto, Kecamatan Sokaraja, Kecamatan Kembaran, bagian Selatan Kabupaten Banyumas antara lain Kecamatan Tambak, Sumpiuh, Kemranjen, Kebasen, Rawalo, Kecamatan Kalibagor bagian Timur, sebagian Kecamatan Patikraja, dan disekitar Sungai Serayu.
- b. Kemiringan >2 – 8% meliputi areal seluas 19.940,49 ha atau 15,02 % dari luas wilayah Kabupaten Banyumas. Wilayah dengan kemiringan ini adalah sebagian Kecamatan Pekuncen, Cilongok, Karanglewas, Sumbang, Wangon sebelah Selatan.
- c. Kemiringan >8 – 15% meliputi areal seluas 13.979,58 ha atau 10,53 % dari luas wilayah Kabupaten Banyumas. Wilayah ini meliputi sebagian Ajibarang, Pekuncen, Cilongok, Kalibagor.
- d. Kemiringan >15 – 25% meliputi areal seluas 16.820,64 ha atau 12,67 % dari luas wilayah Kabupaten Banyumas. Wilayah ini meliputi Kecamatan Gumelar, Lumbir, Wangon bagian Utara, Pekuncen bagian Barat, Sumbang bagian Timur.
- e. Kemiringan >25 - 40% meliputi areal seluas 13.740,61 ha atau 10,35 % dari luas wilayah Kabupaten Banyumas. Wilayah ini meliputi sebagian Rawalo, Kemranjen, Gumelar, Wangon, Kedungbanteng, dan Baturaden.
- f. Kemiringan >40% meliputi areal seluas 25.649,15 ha atau 19,32% dari luas wilayah Kabupaten Banyumas. Wilayah ini meliputi Lereng Gunung Merak, sebagian Sumpiuh, Tambak, Somagede.



Gambar 1.1. Peta Rupa Bumi Kabupaten Banyumas

Kondisi klimatologi wilayah Kabupaten Banyumas mempunyai iklim tropis basah seperti umumnya wilayah-wilayah di Indonesia. Rata-rata suhu udara bulanan  $26,3^{\circ}\text{C}$ , dengan suhu minimum tercatat  $24,4^{\circ}\text{C}$  dan suhu maksimum  $30,9^{\circ}\text{C}$ . Sedangkan curah hujan di wilayah Kabupaten Banyumas pada tahun 2000 rata-rata sebesar 2.750 mm/tahun. Angka ini menunjukkan bahwa di wilayah Kabupaten Banyumas memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Tingginya curah hujan ini didukung oleh kondisi geografi wilayah Kabupaten Banyumas yaitu terletak di lereng Gunung Slamet. Beberapa daerah yang mempunyai curah hujan tinggi adalah Kecamatan Baturaden dengan stasiun penakar hujan Baturaden yaitu 4.292 mm/tahun, Kecamatan Sumpiuh dengan stasiun penakar hujan di Desa Kebokura 5.683 mm/th, stasiun panakar hujan di Desa Bogangin 3.633 mm/th dan stasiun otomatis di Desa Sumpiuh 3.671 mm/th, Kecamatan Cilongok dengan stasiun penakar hujan di Desa Cikidang 4.323 mm/th.

Berdasarkan data pencatatan curah hujan, typologi iklim di Kabupaten Banyumas adalah :

- a. Type A dengan nilai Q antara 0% - 14,3%, meliputi sekitar puncak Gunung Slamet dan Kranggan dengan curah hujan sangat tinggi yaitu antara 4000 – 5000 mm/tahun.
- b. Type B nilai Q antara  $>14,3\%$  - 33,3%, meliputi wilayah Kaki Gunung Slamet dan sebagian besar lembah Serayu dengan curah hujan antara 3000 – 4000 mm/tahun.
- c. Type C dengan nilai Q antara  $>33,3\%$  - 60% meliputi lembah Serayu, Pegunungan Serayu Selatan dan daerah pantai Selatan dengan curah hujan antara 2000 – 3000 mm/tahun.

Luas wilayah Kabupaten Banyumas adalah 132.759 Ha, dengan penggunaan lahan secara garis besar dibagi menjadi 2 (dua), yaitu lahan basah dan lahan kering. Penggunaan lahan untuk kegiatan lahan kering mempunyai porsi yang cukup besar, yaitu 100.800,78 Ha atau 75,92% dari total wilayah di Kabupaten Banyumas, sedangkan penggunaan lahan basah atau untuk kegiatan sawah berdasarkan data terakhir tentang inventarisasi lahan sawah tahun 2006 seluas 31.958,226 Ha atau 24,08% dari total wilayah Kabupaten Banyumas. Berdasarkan potensinya lahan sawah seluas 31.958,226 Ha tersebut terbagi atas lahan sawah beririgasi teknis seluas 13.268,66 Ha (41,51%), irigasi setengah teknis seluas 2.689,11 Ha (8,41%), irigasi sederhana 12.362,23 Ha (38,68%), dan irigasi tadah hujan 3.638,226 Ha (11,38%).

Berdasarkan Undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pembagian kewenangan pengelolaan irigasi ditetapkan bahwa Daerah Irigasi dengan luas areal 3000 ha keatas adalah wewenang Pemerintah ( Pusat ), Daerah Irigasi dengan areal 1000 ha – 3000 ha adalah wewenang Pemerintah Propinsi ( Jawa Tengah ) dan Daerah Irigasi dengan luas areal sampai dengan 1000 ha adalah wewenang Pemerintah Kabupaten ( Banyumas ) sehingga potensi areal sawah beririgasi di Kabupaten Banyumas seluas 28.320 ha tersebut terbagi dalam tiga kewenangan pengelolaan sbb :

- a. Daerah Irigasi wewenang Pemerintah Kabupaten Banyumas meliputi Sawah beririgasi teknis seluas 2.407,76 Ha, irigasi setengah teknis seluas 2.689,11 Ha, dan irigasi sederhana seluas 12.362,23 Ha sehingga jumlah areal sawah beririgasi di Kabupaten Banyumas yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten Banyumas adalah seluas 17.459,10 Ha
- b. Daerah Irigasi wewenang Pemerintah Propinsi Jawa Tengah meliputi Sawah beririgasi teknis seluas 4.594,93 Ha sehingga jumlah areal sawah beririgasi di Kabupaten Banyumas yang menjadi wewenang Pemerintah Propinsi Jawa Tengah adalah seluas 4.594,93 Ha
- c. Daerah Irigasi wewenang Pemerintah Pusat meliputi Sawah beririgasi teknis seluas 6.266,96 Ha sehingga jumlah areal sawah beririgasi di Kabupaten Banyumas yang menjadi wewenang Pemerintah Pusat adalah seluas 6.266,96 Ha

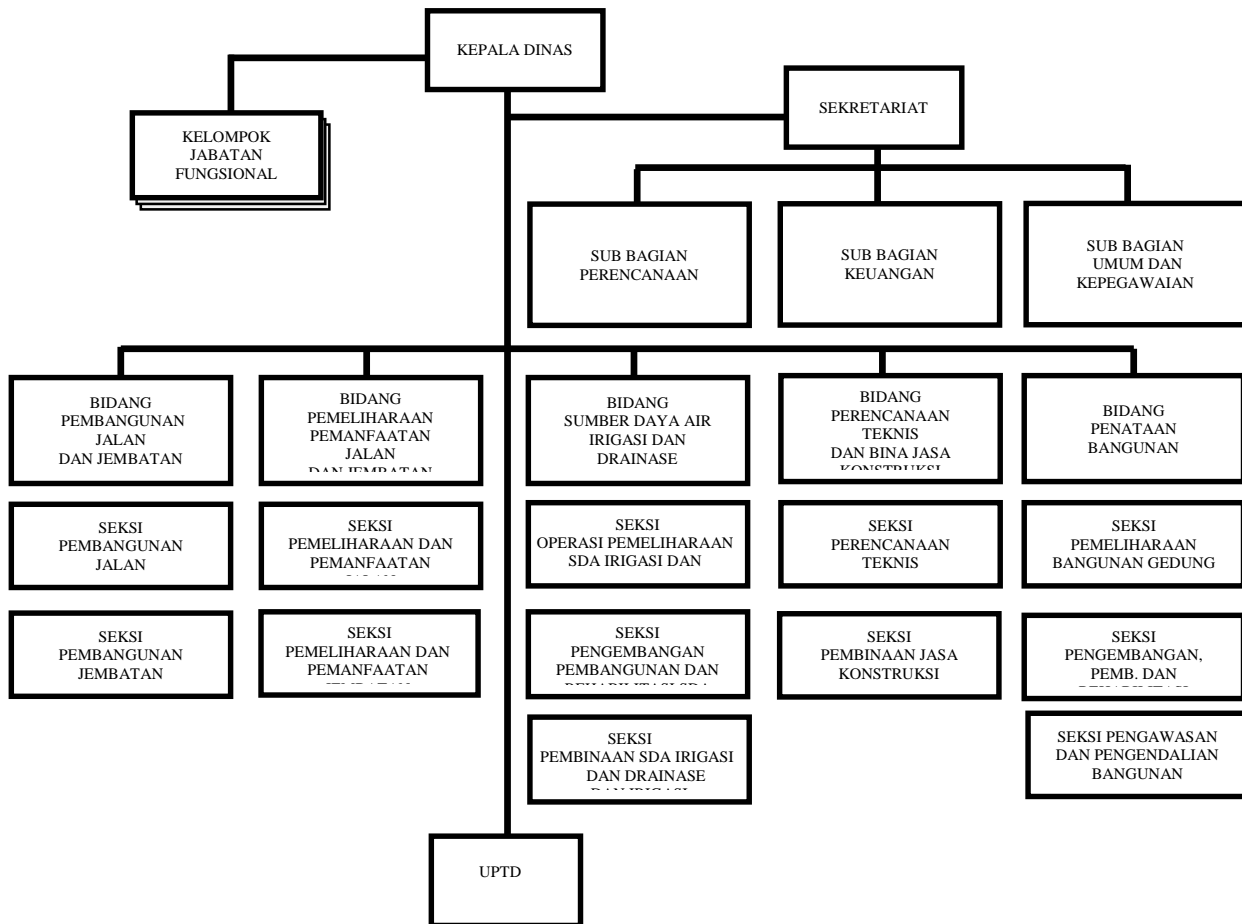
## **2. Tugas Pokok Dan Fungsi**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) dan Peraturan Bupati

Banyumas Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta tata kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Perencanaan;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang Sumber Daya Air, Irigasi dan Drainase, terdiri dari:
  - a. Seksi Pengembangan dan Pembangunan dan Rehabilitasi SDA, Irigasi dan Drainase;
  - b. Seksi Operasi Pemeliharaan SDA, Irigasi dan Drainase;
  - c. Seksi Pembinaan SDA, Irigasi dan Drainase;
4. Bidang Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan, terdiri dari:
  - a. Seksi Pembangunan Jalan;
  - b. Seksi Pembangunan Jembatan;
5. Bidang Pemeliharaan, Pemanfaatan Jalan dan Jembatan, terdiri dari:
  - a. Seksi Pemeliharaan dan Pemanfaatan Jalan;
  - b. Seksi Pemeliharaan dan Pemanfaatan Jembatan;
6. Bidang Bidang Penataan Bangunan, terdiri dari:
  - a. Seksi Pengembangan, Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung;
  - b. Seksi Pemeliharaan Bangunan Gedung;
  - c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan;
7. Bidang Perencanaan Teknis dan Bina Jasa Konstruksi, terdiri dari:
  - a. Seksi Perencanaan Teknis;
  - b. Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Banyumas sebagai berikut :



Gambar 1.2. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kab. Banyumas Berdasarkan Perbup Kabupaten Banyumas nomor 70 tahun 2018.

Adapun Fungsi dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas antara lain :

- perumusan kebijakan kesekretariatan, bidang pembangunan jalan dan jembatan, bidang pemeliharaan, pemanfaatan jalan dan jembatan, bidang sumber daya air, irigasi dan drainase, bidang perencanaan teknis dan bina jasa konstruksi, bidang penataan bangunan;
- pelaksanaan koordinasi kebijakan kesekretariatan, bidang pembangunan jalan dan jembatan, bidang pemeliharaan, pemanfaatan jalan dan jembatan, bidang sumber daya air, irigasi dan drainase, bidang perencanaan teknis dan bina jasa konstruksi, bidang penataan bangunan;
- pelaksanaan kebijakan kesekretariatan, bidang pembangunan jalan dan jembatan, bidang pemeliharaan, pemanfaatan jalan dan jembatan, bidang sumber daya air, irigasi dan drainase, bidang perencanaan teknis dan bina jasa konstruksi, bidang penataan bangunan;
- pembinaan dan/atau fasilitas kebijakan kesekretariatan, bidang pembangunan jalan dan jembatan, bidang pemeliharaan, pemanfaatan jalan dan jembatan,



- bidang sumber daya air, irigasi dan drainase, bidang perencanaan teknis dan bina jasa konstruksi, bidang penataan bangunan;
- e. pelaksanaan monitoring, pengawasan, evaluasi dan pelaporan umum kesekretariatan, bidang pembangunan jalan dan jembatan, bidang pemeliharaan, pemanfaatan jalan dan jembatan, bidang sumber daya air, irigasi dan drainase, bidang perencanaan teknis dan bina jasa konstruksi, bidang penataan bangunan;
  - f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan, bidang pembangunan jalan dan jembatan, bidang pemeliharaan, pemanfaatan jalan dan jembatan, bidang sumber daya air, irigasi dan drainase, bidang perencanaan teknis dan bina jasa konstruksi, bidang penataan bangunan;
  - a. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3. Latar Belakang**

Dengan diterbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). LKjIP tersebut disusun berdasarkan dokumen perencanaan dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan LKjIP Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2019 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan visi, misi dan rencana kinerja Tahun 2019. LKjIP juga dimaksudkan sebagai umpan balik untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas serta mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (good governance).

### **4. Dasar Hukum**

1. TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998, tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

2. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme , sebagai tindak lanjut dari Tap MPR.
3. Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
5. Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
6. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/31/M.PAN/12/2004 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 29 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

## 5. Sistematika Penyusunan

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2017, adalah sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

Menyajikan Tupoksi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas, Latar Belakang dan Dasar Hukum Penyusunan LAKIP

Bab II : PERENCANAAN KINERJA

Menyajikan ringkasan / ikhtisar sasaran utama yang ingin diraih pada Tahun 2017, kaitan sasaran tersebut dengan Visi – Misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 yang menjadi Tupoksi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas bersangkutan.

Bab III : AKUNBILITAS KINERJA

Menyajikan uraian hasil pengukuran dan evaluasi kinerja yaitu uraian tentang keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil, termasuk penyajian aspek akuntabilitas keuangan.

Bab IV : PENUTUP

Lampiran – lampiran

## Bab II PERENCANAAN KINERJA

### 1. Perencanaan Kinerja

Perencanaan Kinerja Tahun 2018 disusun berdasarkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) periode Tahun 2013 – 2018, mengacu pada Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD merupakan penjabaran dari Visi Misi dan Program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Visi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan seluruh kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas periode Tahun 2018-2023 adalah **"Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri"**. Untuk mewujudkan Visi tersebut maka Misi Daerah yang menjadi prioritas adalah Misi ke-6 yaitu Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan.

Implementasi Visi dan Misi tersebut dirumuskan dan dijabarkan ke dalam 7 Tujuan dan 14 Sasaran yang akan dicapai melalui penetapan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan serta penentuan prioritas pembangunan daerah.

Tabel 2.1. Rincian Tujuan dan Sasaran beserta Indikator Kinerja

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
-1	-2		-3	-4
1	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur SDA	Persentase infrastruktur SDA dalam kondisi baik	Meningkatnya luas dan tingkat layanan jaringan irigasi dan Ketersediaan sumber air baku.	Persentase jumlah embung / situ yang dimanfaatkan untuk sumber air baku Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik Rasio jaringan irigasi Persentase luas layanan air irigasi Persentase kenaikan anggaran irigasi

N O	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
-1	-2		-3	-4
			Meningkatnya Kualitas pengendalian banjir dan penanganan daerah rawan bencana.	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor
2	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur Jalan dan Jembatan	Persentase wilayah yang terkoneksi oleh jalan dalam kondisi baik	Meningkatnya Kualitas dan kuantitas jaringan jalan	<p>Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik</p> <p>Prosentase terbangunnya akses jalan menuju Kawasan Industri</p> <p>Persentase peningkatan jalan hotmix</p> <p>Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk</p> <p>Persentase jumlah jembatan Terbangun</p> <p>Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)</p> <p>Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik ( &gt; 40 KM/Jam)</p> <p>Persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik</p>
3	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas	Persentase aset bangunan gedung	Meningkatnya infrastruktur Bangunan yang laik fungsi	Persentase bangunan gedung Pemerintah Daerah dalam kondisi baik

<b>N O</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>
-1	-2		-3	-4
	infrastruktur Tata Bangunan	Pemerintah Daerah dalam kondisi baik		Persentase ketersediaan sarpras pusat kantor pemerintahan terpadu
4	Mewujudkan Keterpaduan Infrastruktur Wilayah Yang Berkelanjutan	Persentase kinerja perencanaan teknis dan kinerja pembinaan jasa konstruksi	Meningkatnya kualitas penyusunan, pemantauan, pembinaan kebijakan perencanaan teknis Dinas Pekerjaan Umum  Meningkatnya dukungan Jasa Konstruksi yang berkualitas	Prosentase Perencanaan Teknis yang berkualitas (H-1)        Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang dibina.

Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama  
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2019

No	Sasaran Prioritas	Indikator Kinerja Prioritas	Target
1	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur SDA	Prosentase Jumlah Infrastruktur SDA dalam Kondisi Baik	73,30%
2	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur Jalan dan Jembatan	Prosentase wilayah yang terkoneksi oleh jalan dalam kondisi baik	85,20%
3	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur Tata Bangunan	Persentase Aset Bangunan Gedung Pemerintah Daerah dalam Kondisi Baik	63,70%
4	Mewujudkan Keterpaduan Infrastruktur Wilayah Yang Berkelanjutan	Prosentase kinerja Perencanaan Teknis dan Kinerja pembinaan Jasa Konstruksi	17,87%

## 2. Perjanjian Kinerja

Pada awal tahun setelah penetapan anggaran Tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas telah menyusun dokumen Penetapan Kinerja (PK) dengan memperhatikan kapasitas sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas, baik sumber daya aparatur, sumber daya keuangan, sarana dan prasarana, kondisi masyarakat dan daya dukung lingkungan serta berdasarkan pada perencanaan strategis Tahun 2018 – 2023.

Tabel 2.2. Penetapan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2019 (Renstra) yang berdasarkan pada target pencapaian Tujuan dan sasaran

NO.	PRIORITAS/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<b>Kepala DPU</b>			
1	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur SDA	Prosentase Jumlah Infrastruktur SDA dalam Kondisi Baik	73,30%
2	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur Jalan dan Jembatan	Prosentase wilayah yang terkoneksi oleh jalan dalam kondisi baik	85,20%
3	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur Tata Bangunan	Persentase Aset Bangunan Gedung Pemerintah Daerah dalam Kondisi Baik	63,70%
4	Mewujudkan Keterpaduan Infrastruktur Wilayah Yang Berkelanjutan	Prosentase kinerja Perencanaan Teknis dan Kinerja pembinaan Jasa Konstruksi	17,87%
<b>Kepala Bidang SDA, Irigasi dan Drainase</b>			
1	Meningkatnya luas dan tingkat layanan jaringan irigasi dan Ketersediaan sumber air baku.	Persentase jumlah embung / situ yang dimanfaatkan untuk sumber air baku	75,00%
		Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	71,60%
		Rasio Jaringan Irigasi	37,69
		Prosentase Luas layanan Air Irigasi	71,60%
		Persentase kenaikan anggaran irigasi	5,00%
2	Meningkatnya Kualitas pengendalian banjir dan penanganan daerah rawan bencana.	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	50,00%
<b>Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan jembatan</b>			
1	Meningkatnya Kualitas dan kuantitas jaringan jalan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	0,48
		Prosentase terbangunnya akses jalan menuju Kawasan Industri	0,00%
		Presentase peningkatan jalan hotmix	20,00%
		Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	0,92206
		Persentase jumlah jembatan Terbangun	99,35%
		Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	5,00%
<b>Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan dan jembatan</b>			
1	Meningkatnya panjang jalan dalam Kondisi baik	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	48,06%
		Persentase Jumlah Jembatan dalam kondisi baik	78,12%

NO.	PRIORITAS/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	<b>Kepala Bidang Penataan Bangunan</b>		
1	Meningkatnya infrastruktur Bangunan yang laik fungsi	Persentase Aset Bangunan Gedung Pemerintah Daerah dalam Kondisi Baik	63,70%
		persentase ketersediaan sarpras pusat kantor pemerintahan terpadu	0,00%
	<b>Kepala Bidang Perencanaan Teknis dan Pembinaan Jasa Konstruksi</b>		
1	Meningkatnya kualitas penyusunan, pemantauan, pembinaan kebijakan perencanaan teknis Dinas Pekerjaan Umum	Prosentase Perencanaan Teknis yang berkualitas H-1	20,00%
2	Meningkatnya dukungan Jasa Konstruksi yang berkualitas	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang dibina.	15,74%



## Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses tersebut dilaksanakan dengan mengukur capaian setiap indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Untuk lebih menggambarkan keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran maka digunakan skala pengukuran seperti Tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1. Skala Pengukuran Pencapaian Tujuan dan Sasaran

SKALA	KATEGORI
91 s/d 100	Sangat Berhasil / sangat baik
71 s/d 90	Cukup Berhasil / cukup baik
55 s/d 70	Kurang Berhasil / kurang baik
Kurang dari 55	Tidak Berhasil / tidak baik

Gambaran keberhasilan Capaian Tujuan dan Sasaran dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Kab. Banyumas direpresentasikan oleh capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), seperti Tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Kategori
	<b>Tujuan</b>				
1	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur SDA	Prosentase Jumlah Infrastruktur SDA dalam Kondisi Baik	73,30%	78,92%	107,66% (Sangat Baik)
2	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur Jalan dan Jembatan	Prosentase wilayah yang terkoneksi oleh jalan dalam kondisi baik	85,20%	85,80%	100,71% (Sangat Baik)
3	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur Tata Bangunan	Persentase Aset Bangunan Gedung Pemerintah Daerah dalam Kondisi Baik	63,70%	66,60%	104,55% (Sangat Baik)
4	Mewujudkan Keterpaduan Infrastruktur Wilayah Yang Berkelanjutan	Prosentase kinerja Perencanaan Teknis dan Kinerja pembinaan Jasa Konstruksi	17,87%	22,47%	125,77% (Sangat Baik)

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Kategori
	<b>Sasaran 1</b>				
1	Meningkatnya luas dan tingkat layanan jaringan irigasi dan Ketersediaan sumber air baku.	Persentase jumlah embung / situ yang dimanfaatkan untuk sumber air baku	75,00%	78,95%	105,26% (Sangat Baik)
		Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	71,60%	78,89%	110,18% (Sangat Baik)
		Rasio Jaringan Irigasi	37,69	38,55	102,29% (Sangat Baik)
		Prosentase Luas layanan Air Irigasi	71,60%	70,87%	98,98% (Sangat Baik)
		Persentase kenaikan anggaran irigasi	5,00%	-0,29%	-5,81% (Tidak Baik)
	<b>Sasaran 2</b>				
1	Meningkatnya Kualitas pengendalian banjir dan penanganan daerah rawan bencana.	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	50,00%	50,03%	100,06% (Sangat Baik)
	<b>Sasaran 3</b>				
1	Meningkatnya Kualitas dan kuantitas jaringan jalan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	0,48	0,38	78,79% (Cukup Baik)
		Prosentase terbangunnya akses jalan menuju Kawasan Industri	0,00%	0,00%	Belum Dihitung (Mulai di 2022)
		Presentase peningkatan jalan hotmix	20,00%	20,10%	100,49% (Sangat Baik)
		Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	0,92206	0,89833	97,43% (Sangat Baik)
		Persentase jumlah jembatan Terbangun	99,35%	99,35%	100,00% (Sangat Baik)
		Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	5,00%	5,05%	101,06% (Sangat Baik)

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Kategori
	<b>Sasaran 4</b>				
1	Meningkatnya panjang jalan dalam Kondisi baik	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	48,06%	37,87%	78,79% (Cukup Baik)
		Persentase Jumlah Jembatan dalam kondisi baik	78,12%	78,63%	100,66% (Sangat Baik)
	<b>Sasaran 5</b>				
1	Meningkatnya infrastruktur Bangunan yang laik fungsi	Persentase Aset Bangunan Gedung Pemerintah Daerah dalam Kondisi Baik	63,70%	66,60%	104,55% (Sangat Baik)
		persentase ketersediaan sarpras pusat kantor pemerintahan terpadu	0,00%	0,00%	Belum Dihitung (Mulai di 2022)
	<b>Sasaran 6</b>				
1	Meningkatnya kualitas penyusunan, pemantauan, pembinaan kebijakan perencanaan teknis Dinas Pekerjaan Umum	Prosentase Perencanaan Teknis yang berkualitas H-1	20,00%	28,00%	140,00% (Sangat Baik)
	<b>Sasaran 7</b>				
1	Meningkatnya dukungan Jasa Konstruksi yang berkualitas	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang dibina.	15,74%	16,95%	107,69% (Sangat Baik)

Dari tabel capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dipresentasikan dalam indikator Tujuan, maka capaian rata-rata kinerja Dinas Pekerjaan Umum adalah **109,67% (sangat baik)**.

Guna mengukur peningkatan kinerja yang dicapai, maka perlu membandingkan capaian Indikator Kinerja Tujuan Tahun 2019 dengan Indikator Kinerja Tujuan Tahun 2018. Namun, dikarenakan tahun 2019 merupakan tahun awal dari implementasi RPJMD 2018-2023 maupun Renstra 2018-2023 dan indikator kinerja yang digunakan juga menggunakan Formulasi yang Baru, sehingga dilakukan perhitungan ulang capaian 2018 dengan cara memasukan data dukung capaian 2018 ke dalam formulasi yang baru, sehingga diperoleh capaian sebagaimana pada tabel Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tujuan Tahun 2019 dengan Tahun Lalu (2018) berikut.

Tabel 3.2. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tujuan Tahun 2019 dengan Tahun Lalu (2018)

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 2018	Realisasi Kinerja 2019	Kategori
1	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur SDA	Prosentase Jumlah Infrastruktur SDA dalam Kondisi Baik	78,68%	78,92%	100,31%
2	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur Jalan dan Jembatan	Prosentase wilayah yang terkoneksi oleh jalan dalam kondisi baik	83,99%	85,80%	102,16%
3	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur Tata Bangunan	Persentase Aset Bangunan Gedung Pemerintah Daerah dalam Kondisi Baik	60,70%	66,60%	109,72%
4	Mewujudkan Keterpaduan Infrastruktur Wilayah Yang Berkelanjutan	Prosentase kinerja Perencanaan Teknis dan Kinerja pembinaan Jasa Konstruksi	N/A	22,47%	N/A (formulasi baru)

**Catatan :**

Capaian 2018 dikonversikan menggunakan formulasi yang digunakan pada indikator baru pada Renstra 2018-2023

Guna mengukur progres kinerja yang dicapai terhadap tujuan akhir periode RPJMD maupun Renstra, maka perlu dibandingkan juga capaian Indikator Kinerja Tujuan Tahun 2019 dengan Target Indikator Kinerja Tujuan Tahun 2023, sehingga diperoleh capaian sebagaimana pada tabel Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019 dengan Target Capaian Dokumen Renstra 2018-2023 berikut.

Tabel 3.2. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019

dengan Target Capaian Dokumen Renstra 2018-2023

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 2019	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Kategori
1	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur SDA	Prosentase Jumlah Infrastruktur SDA dalam Kondisi Baik	78,92%	78,80%	100,15%
2	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur Jalan dan Jembatan	Prosentase wilayah yang terkoneksi oleh jalan dalam kondisi baik	85,80%	91,24%	94,04%
3	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur Tata Bangunan	Persentase Aset Bangunan Gedung Pemerintah Daerah dalam Kondisi Baik	66,60%	75,70%	87,98%
4	Mewujudkan Keterpaduan Infrastruktur Wilayah Yang Berkelanjutan	Prosentase kinerja Perencanaan Teknis dan Kinerja pembinaan Jasa Konstruksi	22,47%	67,55%	33,27%

Sebagai pelengkap perhitungan pencapaian Indikator Kinerja Tujuan dan sasaran, maka pada bagian akhir dokumen ini, dilampirkan pula Matrik Pengukuran Kinerja Pejabat Struktural yang ada di DPU.

Analisa penyebab keberhasilan / kegagalan

1. Persentase kenaikan anggaran irigasi,

Indikator ini merupakan Hasta Kridha Bupati, namun Pencapaian indikator ini hanya -5,81% yang dikarenakan terjadinya penurunan anggaran tahun 2019 dibanding tahun sebelumnya (2018), yakni dari Rp. 15.141.731.000 pada 2018 menjadi Rp. 15.097.769.939 pada 2019 atau turun 0,29% dan jika diakumulasikan dengan target kenaikan sebesar 5%/tahun dan bandingkan dengan target maka akan menjadi -5,81%. Capaian indikator ini lebih banyak dipengaruhi dari faktor kebijakan TAPD dalam menganggarkan Anggaran untuk Infrastruktur Irigasi.

2. Prosentase Luas layanan Air Irigasi

Pencapaian indikator ini hanya -98,98% yang dikarenakan adanya kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan yaitu IPDMIP.

3. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan Persentase jalan

kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam)

dengan target RKPD 2019 = 0.48, Sedangkan Capaian Kinerja Tahun 2019 adalah 0,38 (78,79%), faktor utama terjadinya deviasi negative ini adalah dikarenakan perhitungannya target dilakukan menggunakan data tahun akhir 2018 dengan kondisi baik jalan sepanjang 649,36 Km (43,061%). Namun di pertengahan tahun 2019, guna mencukupi permintaan data dari kementerian PUPR sebagai syarat pengajuan anggaran DAK, maka dilakukan survey kondisi jalan dengan metode SDI sehingga menghasilkan data jalan kondisi baik sepanjang 534,93 Km (35,47%). Sehingga capaian sesungguhnya dari indikator ini adalah naik.

4. Indikator Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk

Dengan target 0,92206 dan capaian 0.89833 (97,43%), ini sesuai data pada buku Data dan Informasi Kabupaten Banyumas tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Banyumas maka diperoleh Jumlah Penduduk Kab. Banyumas sejumlah 1.679.124 Jiwa sedangkan panjang jalan Kabupaten adalah 1508,4 Km sehingga capaian Kinerja Tahun 2019 adalah 0.89833, sehingga Capaian terhadap target kinerja RKPD adalah 97.43%, sedangkan Capaian terhadap target akhir RPJMD adalah 101.32% Indikator ini dibawah target dikarenakan kenaikan jumlah penduduk yang diatas prediksi yang digunakan dalam perhitungan sejumlah 1.635.909 jiwa.

Analisa atas efisiensi penggunaan Sumber Daya

Anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2019 untuk Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas setelah Perubahan adalah sebesar **Rp. 287.708.789.509,00** dapat direalisasi **Rp. 275.036.044.428,00** atau **95,53%**, sehingga **Rp. 12.672.745.081 (4,47%)** yang menjadi **SILPA**.

Dari pagu total DPU, jumlah Belanja Modal mencapai Rp. 242.096.336.856 dengan realisasi Rp. 233.128.287.669 sehingga terdapat sisa Rp. 8.968.049.187 (70,77% dari nilai SILPA).

Salah satu faktor dari nilai SILPA tersebut adalah sisa Tender dan beberapa paket yang gagal lelang.

## B. Realisasi Anggaran

Anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2019 untuk Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas setelah Perubahan sebesar **Rp. 304.553.784.592,00** dapat direalisasi **Rp. 290.953.680.530,00** atau **95,53%**, terdiri dari :

Tabel 3.4. Anggaran Belanja dan Realisasi untuk DPU

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
I	PENDAPATAN	600.000.000	1.194.161.469	199,03%
II	BELANJA	304.553.784.592	290.953.680.530	95,53%
	Belanja Tidak Langsung	16.844.995.083	15.917.636.102	94,49%
	<b>Belanja Langsung</b>	<b>287.708.789.509</b>	<b>275.036.044.428</b>	<b>95,60%</b>
	- Belanja Pegawai	17.177.504.083	16.048.716.102	93,43%
	- Belanja Barang Jasa	40.955.528.653	37.471.668.759	91,49%
	- Belanja Hibah	4.324.415.000	4.305.008.000	99,55%
	- Belanja Modal	242.096.336.856	233.128.287.669	96,30%

Sedangkan informasi biaya yang dibutuhkan dalam mewujudkan sasaran yang terinci dalam anggaran dan realisasi per program adalah seperti Tabel 3.5 berikut :

Tabel 3.5. Anggaran dan Realisasi per Program

No	Sasaran dan Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	Meningkatnya Kualitas dan kuantitas jaringan jalan			
	a. Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan	173.972.834.013	169.345.009.922	97,34%
	b. Program Pembangunan dan Penggantian Jembatan	12.708.196.465	12.630.616.650	99,39%
	c. Program Pembangunan Bangunan Pelengkap Jalan / Jembatan	18.428.427.619	18.114.914.850	98,30%
2.	Meningkatnya panjang jalan dalam Kondisi baik			
	a. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan	9.989.719.216	9.170.923.242	91,80%
	b. Program Pemeliharaan / Rehabilitasi Jembatan	5.250.000.001	5.031.362.720	95,84%
	c. Program Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan / Jembatan	2.445.000.000	2.269.278.800	92,81%
3.	Meningkatnya luas dan tingkat layanan jaringan irigasi dan Ketersediaan sumber air baku.			

No	Sasaran dan Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
	a. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	15.097.769.939	11.058.322.090	73,24%
4.	Meningkatnya Kualitas pengendalian banjir dan penanganan daerah rawan bencana.			
	a. Program Pembangunan Turap / Talud / Brojong	4.807.000.000	4.732.320.200	98,45%
	b. Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku	400.000.000	300.089.150	75,02%
	c. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	1.775.000.000	1.688.463.900	95,12%
5.	Meningkatnya infrastruktur Bangunan yang laik fungsi			
	a. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung	36.330.092.257	35.072.983.933	96,54%
	b. Program Peningkatan Pengelolaan Bangunan Gedung	400.000.000	209.146.050	52,29%
6.	Meningkatnya kualitas penyusunan, pemantauan, pembinaan kebijakan perencanaan teknis Dinas Pekerjaan Umum			
	a. Program Peningkatan Perencanaan Teknis	1.108.500.000	1.064.566.315	96,04%
7.	Meningkatnya dukungan Jasa Konstruksi yang berkualitas			
	a. Program Pembinaan Jasa Konstruksi	110.000.000	90.846.962	82,59%
8.	Program Penunjang			
	a. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	225.000.000	183.643.045	81,62%
9.	Program Administrasi Perkantoran			
	a. Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	4.661.250.000	4.073.556.599	87,39%
	<b>Jumlah :</b>	287.708.789.509	275.036.044.428	95,60%



Adapun langkah-langkah antisipatif yang diambil dalam rangka menghadapi kendala yang ada sebagai berikut yaitu pembuatan Time Schedule yang akurat terhadap rencana dan realisasi pencapaian.

## Bab IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas telah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah, kita menyadari sekalipun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah dikembangkan sejak awal era reformasi dengan diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam penerapannya masih mengalami kendala karena pemahaman yang masih parsial, dan juga karena kesulitan mengubah paradigma untuk membangun manajemen pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented Government*).

Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2019 adalah Hasil yang diperoleh dari pengukuran Penetapan Kinerja Tahun 2019 dapat disimpulkan Sangat Baik.

Saran :

1. Walaupun capaian kinerja Tahun 2019 termasuk dalam kategori sangat baik, namun mencermati hasil analisis masih terdapat kendala yang memerlukan upaya dan komitmen bersama untuk meningkatkan kinerja agar penetapan kinerja yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik terlebih lagi manfaat dan dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
2. Perlu dibangun mekanisme pengumpulan data kinerja yang baik sehingga proses pengukuran kinerja dapat berjalan baik serta menjadi umpan balik dalam mengevaluasi capaian kinerja atas kebijakan dan program yang dilakukan.
3. Merumuskan sasaran yang selaras dengan kegiatan dan program, dan perumusan indikator kinerja sebagai tolok ukur untuk mengetahui capaian kinerja yang sesuai kondisi riil, untuk menyajikan penentuan target secara tepat.

Banyumas, Pebruari 2020  
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS

**Dr. Ir. IRAWADI, CES**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640418 1991 1 007

## RENCANA KINERJA TAHUNAN

PERANGKAT DAERAH : DINAS PEKERJAAN UMUM

TAHUN : 2020

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
(1)	(2)	(3)
Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur SDA	Prosentase Jumlah Infrastruktur SDA dalam Kondisi Baik	74,05%
Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur Jalan dan Jembatan	Prosentase wilayah yang terkoneksi oleh jalan dalam kondisi baik	86,71%
Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur Tata Bangunan	Persentase Aset Bangunan Gedung Pemerintah Daerah dalam Kondisi Baik	66,70%
Mewujudkan Keterpaduan Infrastruktur Wilayah Yang Berkelanjutan	Prosentase kinerja Perencanaan Teknis dan Kinerja pembinaan Jasa Konstruksi	30,29%

Purwokerto, Pebruari 2020

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM

KABUPATEN BANYUMAS

**Dr. Ir. IRAWADI, CES**

Pembina Utama Muda

NIP. 19640418 1991 1 007

**PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2019  
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur SDA	Prosentase Jumlah Infrastruktur SDA dalam Kondisi Baik	73,30%	78,92%	107,66%
2	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur Jalan dan Jembatan	Prosentase wilayah yang terkoneksi oleh jalan dalam kondisi baik	85,20%	85,80%	100,71%
3	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur Tata Bangunan	Persentase Aset Bangunan Gedung Pemerintah Daerah dalam Kondisi Baik	63,70%	66,60%	104,55%
4	Mewujudkan Keterpaduan Infrastruktur Wilayah Yang Berkelanjutan	Prosentase kinerja Perencanaan Teknis dan Kinerja pembinaan Jasa Konstruksi	17,87%	22,47%	125,77%

Purwokerto, Pebruari 2020  
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS

**Dr. Ir. IRAWADI, CES**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640418 1991 1 007

**PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2019**  
**KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR, IRIGASI**  
**DAN DRAINASE DPU KAB. BANYUMAS**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)
1.	Meningkatnya luas dan tingkat layanan jaringan irigasi dan Ketersediaan sumber air baku.	Persentase jumlah embung / situ yang dimanfaatkan untuk sumber air baku	75,00%	78,95%	105,26%
		Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	71,60%	78,89%	110,18%
		Rasio Jaringan Irigasi	37,69	38,55	102,29%
		Prosentase Luas layanan Air Irigasi	71,60%	70,87%	98,98%
		Persentase kenaikan anggaran irigasi	5,00%	-0,29%	-5,81%
2.	Meningkatnya Kualitas pengendalian banjir dan penanganan daerah rawan bencana.	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	50,00%	50,03%	100,06%

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS

Purwokerto, Pebruari 2020  
KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR,  
IRIGASI DAN DRAINASE

**Dr. Ir. IRAWADI, CES**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640418 1991 1 007

**KRESNAWAN WAHYU K, ST., M.Si.**  
Pembina  
NIP. 19671229 199002 1 002

**PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2019**  
**KEPALA BIDANG PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN**  
**DPU KAB. BANYUMAS**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)
1.	Meningkatnya Kualitas dan kuantitas jaringan jalan.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	0,48	0,38	78,79%
		Prosentase terbangunnya akses jalan menuju Kawasan Industri	0,00%	0,00%	-
		Presentase peningkatan jalan hotmix	20,00%	20,10%	100,49%
		Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	0,92206	0,89833	97,43%
		Persentase jumlah jembatan Terbangun	99,35%	99,35%	100,00%

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS

Purwokerto, Pebruari 2020  
 KEPALA BIDANG PEMBANGUNAN JALAN  
 DAN JEMBATAN

**Dr. Ir. IRAWADI, CES**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19640418 1991 1 007

**Ir. AKHMAD TAUFIK**  
 Pembina  
 NIP. 19630621 199202 1 003

**PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2019**  
**KEPALA BIDANG PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN**  
**DPU KAB. BANYUMAS**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)
1.	Meningkatnya panjang jalan dalam Kondisi baik	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam)	48,06%	37,87%	78,79%
		Persentase Jumlah Jembatan dalam kondisi baik	78,12%	78,63%	100,66%

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
 KABUPATEN BANYUMAS

Purwokerto, Pebruari 2020  
 KEPALA BIDANG PEMELIHARAAN JALAN  
 DAN JEMBATAN

**Dr. Ir. IRAWADI, CES**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19640418 1991 1 007

**ACHMAD SETIAWAN, ST.**  
 Pembina  
 NIP. 19620215 199103 1 009

**PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2019**  
**KEPALA BIDANG PENATAAN BANGUNAN**  
**DPU KAB. BANYUMAS**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)
1.	Meningkatnya infrastruktur Bangunan yang laik fungsi	Persentase Aset Bangunan Gedung Pemerintah Daerah dalam Kondisi Baik	63,70%	66,60%	104,55%
		persentase ketersediaan sarpras pusat kantor pemerintahan terpadu	0,00%	0,00%	-

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
 KABUPATEN BANYUMAS

Purwokerto, Pebruari 2020  
 KEPALA BIDANG PENATAAN BANGUNAN

**Dr. Ir. IRAWADI, CES**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19640418 1991 1 007

**WAHYUDIONO, S.ST.**  
 Pembina  
 NIP. 19690517 199803 1 004



**PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2019**  
**KEPALA BIDANG PERENCANAAN TEKNIS DAN JASA**  
**KONSTRUKSI**  
**DPU KAB. BANYUMAS**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)
1.	Meningkatnya kualitas penyusunan, pemantauan, pembinaan kebijakan perencanaan teknis Dinas Pekerjaan Umum	Prosentase Perencanaan Teknis yang berkualitas H-1	20,00%	28,00%	140,00%
2.	Meningkatnya dukungan Jasa Konstruksi yang berkualitas	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang dibina.	15,74%	16,95%	107,69%

Purwokerto, Pebruari 2020

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS

KEPALA BIDANG PERENCANAAN TEKNIS  
DAN JASA KONSTRUKSI

**Dr. Ir. IRAWADI, CES**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640418 1991 1 007

**KHELMY TIBYANI, ST., MT.**  
Pembina  
NIP. 19750113 200312 1 004

**PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2019**  
**DPU KAB. BANYUMAS**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				Realisasi s/d Triwulan Ini	Capaian	Permasalahan	Solusi
				I	II	III	IV				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Sasaran 1										
	Meningkatnya luas dan tingkat layanan jaringan irigasi dan Ketersediaan sumber air baku.	Persentase jumlah embung / situ yang dimanfaatkan untuk sumber air baku	75,00%	73,33%	73,33%	73,33%	78,95%	78,95%	105,26%		
		Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	71,60%	78,68%	78,68%	78,68%	78,89%	78,89%	110,18%		
		Rasio Jaringan Irigasi	37,69	38,55	38,55	38,55	38,55	38,55	102,29%		
		Prosentase Luas layanan Air Irigasi	71,60%	71,22%	71,22%	71,22%	70,87%	70,87%	98,98%		
		Persentase kenaikan anggaran irigasi	5,00%	-4,32%	-4,32%	-4,32%	-0,29%	-0,29%	-5,81%	Hasta Kridha Bupati, namun capaian indikator ini lebih banyak dipengaruhi dari faktor kebijakan TAPD dalam memberi porsi Anggaran untuk Infrastruktur Irigasi	Malakukan koordinasi lebih lanjut ke Bappedalitbang Kab. Banyumas untuk dapat mengawal Capaian Kenaikan Anggaran Irigasi.
2	Sasaran 2										

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				Realisasi s/d Triwulan Ini	Capaian	Permasalahan	Solusi
				I	II	III	IV				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Meningkatnya Kualitas pengendalian banjir dan penanganan daerah rawan bencana.	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	50,00%	49,00%	49,78%	49,87%	50,03%	50,03%	100,06%		
3	Sasaran 3										
	Meningkatnya Kualitas dan kuantitas jaringan jalan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	0,48	0,43	0,43	0,43	0,38	0,38	78,79%		
		Prosentase terbangunnya akses jalan menuju Kawasan Industri	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Hasta Kridha Bupati, dan target di Tahun 2019 adalah 0, (rencana akan dimulai pada tahun 2022)	
		Presentase peningkatan jalan hotmix	20,00%	0,00%	0,15%	9,31%	20,10%	20,10%	100,49%		
		Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	0,92206	0,92206	0,92206	0,89833	0,89833	0,89833	97,43%		
		Persentase jumlah jembatan Terbangun	99,35%	99,24%	99,24%	99,24%	99,35%	99,35%	100,00%		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				Realisasi s/d Triwulan Ini	Capaian	Permasalahan	Solusi
				I	II	III	IV				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	5,00%	4,80%	4,91%	5,02%	5,05%	5,05%	101,06%		
4	Sasaran 4										
	Meningkatnya panjang jalan dalam Kondisi baik	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	48,06%	43,06%	43,06%	43,06%	41,94%	37,87%	78,79%		
		Persentase Jumlah Jembatan dalam kondisi baik	78,12%	77,02%	77,02%	77,02%	78,63%	78,63%	100,66%		
5	Sasaran 5										
	Meningkatnya infrastruktur Bangunan yang laik fungsi	Persentase Aset Bangunan Gedung Pemerintah Daerah dalam Kondisi Baik	63,70%	60,70%	60,70%	60,70%	66,60%	66,60%	104,55%		
		persentase ketersediaan sarpras pusat kantor pemerintahan terpadu	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
6	Sasaran 6										

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				Realisasi s/d Triwulan Ini	Capaian	Permasalahan	Solusi
				I	II	III	IV				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Meningkatnya kualitas penyusunan, pemantauan, pembinaan kebijakan perencanaan teknis Dinas Pekerjaan Umum	Prosentase Perencanaan Teknis yang berkualitas H-1	20,00%	0,00%	4,00%	6,00%	28,00%	28,00%	140,00%		
7	Sasaran 7										
	Meningkatnya dukungan Jasa Konstruksi yang berkualitas	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang dibina.	15,74%	10,90%	13,32%	13,32%	16,95%	16,95%	107,69%		

Purwokerto, Pebruari 2020  
 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
 KABUPATEN BANYUMAS

**Dr. Ir. IRAWADI, CES**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19640418 1991 031 007

